



## UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GARUT

Rana Putri Kurniawan<sup>1,2,5</sup>; Muhammad Alvin Giffary<sup>1,3</sup>; Wendy Marbun<sup>1,4</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<sup>2</sup>Pemerintah Kota Payakumbuh

<sup>3</sup>Pemerintah Kota Padang

<sup>4</sup>Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

<sup>5</sup>corresponding author: [ranaputri1406@gmail.com](mailto:ranaputri1406@gmail.com)

### ABSTRACT

*The pandemic that is endemic throughout the world is making every country work hard to eradicate it. has been declared by the World Health Organization (WHO) as a Global Public Health Emergency which is known to spread to all corners of the world very quickly. Coronavirus is a new virus that causes illness ranging from mild to severe symptoms. There are at least two types of corona viruses that cause serious illness, namely Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a new disease that has never been identified in humans. The virus that causes is called SarsCoV2. COVID-19 is a new disease and there is very little research on it. Evidence-based information is required for the care, treatment and other information related to this disease. The Indonesian government later declared the Corona problem as an unnatural or non-natural national disaster. The President of the Republic of Indonesia, regional governments and their staff work together in various efforts to prevent the spread of the virus in the community. From ministerial level to province, district or city*

**Keywords:** *Pandemic, Local Government, Efforts*

### ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia ini membuat setiap negara bekerja keras untuk memberantasnya. Sudah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat secara Global (Global Public Health Emergency) yang mana telah diketahui menyebar ke seluruh pelosok dunia dengan sangat cepat. Coronavirus adalah virus baru yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan hingga berat. Setidaknya ada dua jenis virus corona yang menyebabkan penyakit serius, yakni Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia. Virus penyebab disebut SarsCoV2. COVID-19 adalah penyakit baru dan hanya ada sedikit penelitian tentangnya. Informasi berbasis bukti diperlukan untuk perawatan, pengobatan, dan informasi lain terkait penyakit ini.

Pemerintah Indonesia kemudian menyatakan masalah Corona sebagai bencana nasional yang tidak wajar atau non-alam. Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah dan jajarannya bekerja sama dalam berbagai upaya pencegahan penyebaran virus di masyarakat. Dari tingkat menteri hingga provinsi, kabupaten atau kota

**Kata Kunci:** Pandemi, Pemerintah Daerah, Upaya Penanggulangan

## PENDAHULUAN

COVID-19 adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini dapat ditularkan dari orang ke orang melalui tetesan pernapasan yang disebabkan oleh batuk dan bersin. Virus ini bisa bertahan selama 3 hari dalam plastik dan stainless steel, dan SARS CoV2 dapat bertahan selama 3 hari atau dalam aerosol selama 3 jam (Kemendagri, 2020: 3). Virus corona ditularkan melalui benda perantara seperti tangan, pakaian, dan benda lain yang terkena hambusan batuk atau bersin. Penyakit ini dikatakan pertama kali muncul di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, pada Desember 2019 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia.. World Health Organization telah menyatakan bahwa wabah ini sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.

Wabah penyakit ini telah mengguncang masyarakat di seluruh dunia, mempengaruhi lebih dari 200 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah di seluruh dunia telah berusaha keras untuk mencegah penyebaran ini salah satu yang kita kenal yaitu *lockdown*

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan telah dinyatakan di Indonesia sebagai penyakit yang menyebabkan kedaruratan dan bencana kesehatan masyarakat. Tidak hanya tidak wajar dan mematikan, tetapi juga merugikan

perekonomian. Diperlukan upaya untuk mengatasinya, termasuk pencegahan dan penanganannya.

Selama masa pandemi, setiap orang harus mematuhi protokol kesehatan (Prokes) guna mencegah penularan COVID-19. Protokol kesehatan yang dimaksud seringkali adalah protokol fisik, seperti: hidup sehat dan bersih, pengukuran suhu (*screening*), penggunaan masker, menjaga jarak aman (*physical distance*), menghindari kerumunan, berjabat tangan, sering mencuci tangan, dan karantina mandiri (Sutrayanti, 2020). Meski berbagai protokol telah ditetapkan oleh pemerintah, penambahan harian kasus masih cukup tinggi. Kementerian Kesehatan mengungkapkan di situs resminya bahwa penambahan kasus setiap hari menunjukkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan masyarakat yang belum optimal.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena virus corona. Di Indonesia kasus pertama ditemukan di Depok Provinsi Jawa Barat. Kejadian ini diumumkan secara langsung di Istana Kepresidenan, Senin, 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Kedua warga yang terpapar virus ini merupakan seorang ibu yang berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun. Ibu dan anak ini diduga tertular karena sempat melakukan kontak dengan orang Jepang yang datang ke Indonesia. Tim peneliti dari Kementerian Kesehatan melakukan survei terhadap warga lain yang sebelumnya diduga memiliki hubungan dengan orang Jepang selama berada di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, anak itu terinfeksi virus corona saat menari dengan seorang

Jepang di sebuah klub di Jakarta pada 14 Februari 2020. Achmad Yurianto (Yuri) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan,, melaporkan acara tersebut dihadiri 50 orang. Pada 16 Februari 2020, ia berkonsultasi dengan dokter untuk tanda-tanda batuk dan demam ringan. Setelah kejadian itu, Kementerian Kesehatan mencari semua orang yang ikut berdansa pada saat itu. Usai mengumumkan kasus pertama di Depok, Presiden RI Joko Widodo menyiapkan fasilitas dan peralatan medis berstandar internasional bagi pemerintah untuk menangani pasien serta menyiapkan anggaran yang dilokasikan untuk penanganan.

Provinsi Jawa Barat yang saat ini dilabeli dengan zona merah, hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan daerah sekitar termasuk pemerintahan Kabupaten Garut. Telah berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Garut seperti diberlakukannya *physical distancing* atau jaga jarak, perintah untuk memakai masker dan membawa handsanitizer jika keluar rumah hingga diturunkannya 3 unit damkar untuk penyemprotan disinfektan disepanjang jalan Ahmad Yani - Ciledug - Papandayan - Pembangunan - Cimanuk - Merdeka - Bunderan Guntur - Guntur - Ciwalen - kembali ke Jalan A. Yani - Siliwangi - dan berakhir di Pendopo. Akan tetapi, upaya ini masih diluar harapan pemerintah daerah Kabupaten Garut dikarenakan berbagai upaya atau kebijakan yang telah diberlakukan kurang direspon baik oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan hal ini, karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam menangani pandemi di Kabupaten Garut.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintahan daerah dalam penanganan

di Kabupaten Garut dari awal terjadinya pandemi ini sampai pada saat ini.

## KAJIAN TEORI

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787) Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat kita simpulkan bahwa usaha adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan secara memadai semua permasalahan yang ada dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Poerwadarminta (2006:1344), upaya adalah usaha untuk menyampaikanmaksud,akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya tersebut erat kaitannya dengan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

## METODE

Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam melakukan, karena penelitian ini digunakan untuk melihat dan memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian tersebut seperti persepsi, perilaku dan lainnya.

Lokasi penelitian berlokasi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan media internet. Metode wawancara adalah wawancara atau percakapan antara beberapa orang antara narasumber dan yang diwawancarai. Dengan kata lain, wawancara adalah komunikasi lisan yang dilakukan oleh beberapa orang. Dengan kemajuan teknologi saat ini, wawancara

dapat dilakukan secara virtual tanpa bertemu langsung, yaitu melalui media. Narasumber dalam penelitian kami ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut yang sempat dilakukan pembekalan materi melalui media *Google Meet*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam upaya penanganan pandemi, dibutuhkan kebijakan yang tegas serta kepedulian masyarakat dalam penanganan virus tersebut. Pemerintah harus dapat mengajak dan meyakinkan kepada masyarakat dampak buruk akibat pandemi. Dalam hal ini, pemerintah aktif mengarahkan masyarakat agar dapat bekerja sama untuk memutus penyebaran. Pemerintah seharusnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik di semua sektor yang ada. Masyarakat tidak dapat mengatasi epidemi COVID-19 sendiri tanpa kebijakan pemerintah yang kuat. Ini adalah fungsi umum yang dilakukan oleh pemerintah.

Kasus pertama Kabupaten Garut di sampaikan langsung oleh Bupati Garut Rudy Gunawan. Pasien pertama tersebut lelaki berumur 56 tahun Dia warga Garut yang merantau sebagai pedagang di Jakarta. Bupati Garut menjelaskan pasien tersebut pulang dari Jakarta ke Garut tepatnya pada Jumat, 20 Maret 2020. Pasien yang datang dalam kondisi demam dan kemudian berobat di salah satu klinik di Garut bagian timur

### **1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut awal Pandemi**

Upaya pertama pemerintah daerah dalam menangani pandemi di Kabupaten Garut adalah gabungan antara petugas pemadam kebakaran, BPBD, Diskominfo, Polres dan Kodim 0611/Garut pada Selasa pagi 24 Mei 2020. Pemerintahan daerah dibantu aparat gabungan TNI/Polri melakukan pencegahan virus corona (COVID-19). Garut Rudy Gunawan Bupati Kabupaten Garut saat itu terjun

langsung melakukan penyemprotan disinfektan di perkotaan. Dalam praktiknya, pemerintah telah menyiapkan lebih dari 1500 alat semprot disinfektan, dengan melibatkan berbagai kalangan yang diterjunkan dan disebar ke 42 kecamatan. Selain itu, Pemkab Garut telah menyiapkan 83 ruang isolasi untuk menangani pasien. Hermi Budiman, Wakil Bupati Garut, mengatakan puluhan kamar tersebar di enam rumah sakit umum dan swasta di wilayah Garut. Selengkapnya, 15 titik di RSUD Dr Slamet Garut, 16 kamar di RS Atan Husada, 15 kamar di RS Pameungpeuk, 6 kamar di RS Nurhayati, 13 kamar di RS Guntur. Tempat tidur, dan terakhir rumah sakit Annisa Queen dengan 7 kamar.

### **2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**

Pada 5 Mei 2020, diterbitkan surat edaran (COVID-19) berjudul Peraturan Perundang-undangan (PERBUP) tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Penanganan Penyakit Virus Corona. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Garut merupakan bagian dari PSBB Jawa Barat dan Perda Kabupaten Garut mewajibkan PSBB untuk mengelola kesehatan untuk COVID-19. Wilayah PSBB ini terdapat 3 pembagian wilayah yaitu: wilayah pertama Perkotaan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Garut Kota, sebagian Kecamatan Banyuresmi, sebagian Karangpawitan, dan sebagian Kecamatan Cilawu. Untuk wilayah kedua, yaitu, Limbangan, Cibatu, Bl. Wanaraja, Selaawi dan Kadungora. Dan wilayah ketiga, terdiri dari 3 kecamatan, yakni, Kecamatan Cikajang, Cisarupan dan Kecamatan Cigedug. Ditambah lagi, pemerintah Kabupaten Garut telah

menyiapkan Dana Jaminan Sosial terkena dampak.

Pada tanggal 8 Januari 2021, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 441/Kep.10-Hukham/2021,, tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional di 20 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penanganan COVID-19, Pemerintah Kabupaten Garut memberlakukan kebijakan dengan membatasi beberapa kegiatan atau aktivitas di Kabupaten Garut, seperti pemberlakuan Work From Home (WFH). Dalam edaran tersebut, Bupati Garut membatasi aktivitas kantor/pekerjaan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Office (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara itu, pada, tanggal 12 Januari 2021 Keputusan Bupati Garut Nomor 443/KEP.13-KESRA/2021, tentang Penetapan Jangka Waktu dan Wilayah Pelaksanaan Pembatasan Sosial Besar secara Proporsional Dalam Penanganan, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menerapkan PSBB di 26 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Garut

Upaya baru-baru ini tepatnya bulan Juli 2021, pemerintah daerah Kabupaten Garut melakukan rapat koordinasi terkait penanganan bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Garut. Bupati Garut, Rudy Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya melakukan langkah preventif dengan melakukan penyetopan sementara beberapa kegiatan, yang gunanya untuk menekan penyebaran virus di wilayahnya. Penyetopan yang dimaksud oleh Bupati Garut adalah dengan melakukan peningkatan protokol kesehatan dan melakukan beberapa penutupan serta pembatasan secara regional di zona merah di Kabupaten Garut. Bukan hanya itu, pemerintah Kabupaten Garut juga melakukan Simulasi Penyekatan dan

Sosialisasi PPKM Darurat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Satuan Tugas COVID-19 (Satgas) melakukan simulasi darurat PPKM dan sosialisasi, serta melakukan karantina di beberapa lokasi di lingkungan Kabupaten Garut, dimana karantina tersebut berada di 13 tempat. Pada masa PPKM darurat ini, Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Garut akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang tidak mematuhi ketentuan PPKM darurat in

Sebagaimana dengan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut melalui Keputusan Bupati Garut Nomor 443/Kep.666-Satpol PP/2021, tentang Penetapan Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan dalam Upaya Penanganan. Wakil Ketua I bidang penanggulangan COVID-19 Garut menggelar rapat sosialisasi Kawasan Patuh Protokol Kesehatan di satu titik yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah membangun delapan pos pantau di Kecamatan Garut Kota termasuk di kecamatan lainnya yang akan didirikan oleh Satgas di tingkat kecamatan. Satgas juga berpatroli, memberikan imbauan serta teguran, bahkan operasi yustisi dan kegiatan kemanusiaan. Satgas Kabupaten Garut juga melakukan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima serta pertokoan di Jl. Ahmad Yani untuk tetap menerapkan prokes dengan jaga jarak di setiap lapak pedagang agar tidak menimbulkan kerumunan.

### **3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan cara Vaksinisasi**

Upaya lainnya pemerintah daerah Kabupaten Garut yaitu Humas Satgas penanganan Kabupaten Garut Yeni

Yunieta menginstruksikan untuk melakukan vaksinasi tahap 3 sesuai dengan Surat Edaran (SE) dengan nomor HK.02.02/I/1727/2021 tentang Vaksinasi Tahap 3 Bagi Masyarakat Rentan serta Masyarakat Umum Lainnya dan Pelaksanaan Bagi Anak-Anak Usia 12-17 Tahun. Menurut pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun dapat dilakukan di fasilitas kesehatan atau sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Namun, tetap melakukankoordinasi dengan Kemendikbud dan Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah dan Kantor Kemenag di Garut untuk mempermudah pendataan dan pemantauan.

Dengan banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam menangani pandemi, setidaknya pemerintah daerah tersebut sudah mengurangi dampak dari pandemi tepatnya di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

## PENUTUP

Upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Garut dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu tahap awal, tahap perberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan tahap vaksinasi. Peran aktif para pemegang jabatan di pemerintahan daerah Kabupaten Garut dengan mengenalkan dan memberlakukan gagasan-gagasan yang dapat direalisasikan kepada masyarakat terutamadi tengah pandemic ini menunjukkan bahwa upaya dan peran pemerintah daerah Kabupaten Garut dapat membuahkan hasil yang nyata dan dapat membantu masyarakat dalam keadaan sekarang ini. Tentu saja agar kebijakan pemerintah daerah ini dapat berhasil maka diperlukan kerjasama antar semua unsur-unsur sosial yang terdapat di pemerintahan, seperti mulai dari Dinas Pemadam dan Kebakaran, BPBD, Diskominfo, Polres dan Kodim 0611/ Garut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, A. H. (2020). *Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah.*
- Ansori, M. H. (2020). *Wabah dan Kelas Sosial di Indonesia. THC Insight*, 14. Retrieved <http://habibiecenter.or.id/img/publication/09da4f0fd333100e97d2b2bc1aec3163.pdf>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi-4.* Jakarta: Gramedia
- Poewadarminta.W.J.S.(1999). *Kamus umum bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Putri Raehan. (2021). *Satgas Garut Lakukan Simulasi Penyekatan dan Sosialisasi PPKM Darurat. 7 Agustus 2021.*
- <https://jabarprov.go.id/index.php/news/42939/2021/07/02/Satgas--Garut-Lakukan-Simulasi-Penyekatan-dan-Sosialisasi-PPKM-Darurat>
- Putri Raehan. (2021). *Satgas Tetapkan Kawasan Patuh Prokes di Beberapa Titik di Kabupaten Garut. 7 Agustus 2021*
- <https://jabarprov.go.id/index.php/news/43276/2021/07/27/Satgas--Tetapkan-Kawasan-Patuh-Prokes-di-Beberapa-Titik-di-Kabupaten-Garut>
- Putri Raehan. (2021). *Satgas. Kemenkes Terbitkan SE Vaksinasi Tahap 3 Bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Umum. 7 Agustus 2021.*
- <https://jabarprov.go.id/index.php/news/42945/2021/07/03/Kemenkes-Terbitkan-SE-Vaksinasi-Tahap-3-Bagi-Masyarakat-Rentan-dan-Masyarakat-Umum>

Satibi, Iwan.(2011). *Teknik Penulisan Skripsi Tesis Disertasi*. Bandung: Ceplas.

Sutrayanti, N. K. (2020). *Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin*. Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.

**Lain-lain**

Keputusan Menteri Kesehatan pada 7 April 2020 Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosisal Berskala Besar (PSBB) Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Disease 2019 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Virus Disease 2019 () Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 441/Kep.10-Hukham/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional di 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat